

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P – RENJA) TAHUN 2023

**DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KOTA BLITAR
2023**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2023. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2023 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen

Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2023. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2023, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang masih berlangsung pada tahun 2022 mendorong peningkatan upaya penanganan dan pemulihan Covid-19 di Kota Blitar baik sebagai tindaklanjut kebijakan nasional, kebijakan provinsi, maupun berdasarkan penilaian kinerja penanganan Covid-19. Selain terkait Covid-19, perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2023 juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2022 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2023 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
3. Perubahan belanja daerah terkait prioritas pembangunan yang fokusnya tetap diarahkan pada penanganan dan pemulihan Covid-19, utamanya pada sektor ekonomi dan kesehatan, penyesuaian pemetaan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2023.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2023. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323);

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
 27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun

- 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 29. Peraturan Walikota Blitar No. 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023; dan
 30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
 31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
 32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor XX).
 33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 nomor XX).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2023 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2023. Tujuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2023 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), bahwa perubahan renja perangkat daerah ditetapkan berdasarkan perda RKPD. Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD yang ditindaklanjuti dengan perubahan renja perangkat daerah menurut Permendagri tersebut adalah adanya perubahan pada :

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan daerah;
3. Prioritas pembangunan daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2023 sampai dengan Tribulan II
BAB III	Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
BAB IV	Penutup

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN
TENAGA KERJA TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIBULAN II**

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2023.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Mikro Kota Blitar sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2023 yang melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 11 program dengan 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 8.938.666.077,00,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 3.039.815.878,00,- atau 34,01 %. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif rendah dikarenakan :

1. Beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, yaitu :
Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro, Kajian pada pendataan dana bergulir dan beberapa pelatihan yang bersumber dari dana DAK Non Fisik dan DBHCHT.

Tabel. 2.1.

Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sampai dengan triwulan 2 Tahun 2023

No	Sasaran	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Thn 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dinkop,UKM & Naker Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinkop, UKM & Naker Tahun 2023 sampai Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Dinkop, UKM & Naker Tahun 2023 sampai triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra PD s/d Tahun 2023		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja		Persentase Pencari Kerja yang Berkompeten	90	8.930.820.500															Dinkop, UKM & Naker
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	50	3.417.031.000	46	2.292..370.300	47	1.999.999.913	-	0	-	474.182.755	-	474.182.755	46	2.764.481.433	92	77,23	Bidang Ketenagakerjaan
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	89	3.579.653.259	83	2.290.298.678	83	1.999.999.913	-	0	-	474.182.755	-	474.182.755	83	2.764.481.433	93,25	77,23	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	650	3.579.653.259	466	2.290.298.678	175	1.999.999.913	-	0	70	474.182.755	70	474.182.755	536	2.764.481.433	82,46	77,25	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yg ditempatkan	83	5.513.789.500	90	310.276.366	79	162.572.334	-	0	-	75.075.450		75.075.450	90	385.351.816	1	124,2	
			Persentase jumlah calon naker yg terserap melalui bursa kerja online	20	-	12		14								12		1		
		Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	Jumlah pencari kerja terdaftar	900	480.189.297	289	286. 616.866	150	77.656.500	-	0	-	0		0	289	286.616.866	1	100	
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari yg mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	300	480.189.297	150	286. 616.866	150	77.656.500	-	0	-	0		0	150	286.616.866	1	100	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui nformasi pasar kerja	37,1	1.312.971.4 90	31	23.6 59.500	32,7	84.661.561	-	0	-	75.075.450		75.075.450	31	98.734.950	1	417,32	
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	390	173.779.000	35	23. 659.500	30	84.661.561	-	0	-	75.075.450		75.075.450	35	98.734.950	1	417,32	
	Meningkatnya Perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan		Persentase Perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	22	844.972.000															

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100	844.972.000	100	97.149.600	100	76.066.984	-	0	-	5.754.144		5.754.144	100	102.903.744	1	105,92	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yg mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau PKB	350	756.701.168	55	97.149.600	75	76.066.984	-	0	-	5.754.144		5.754.144	55	102.903.744	1	105,92	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Persh yg erakibat/Berdampak pd Kepentingan di 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	20	581.145.480	75	71.569.000	5	53.238.484	-	0		5.754.144		5.754.144	75	77.323.144	1	108,04	
		PencegahanPerselisiha n HI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan ygBerakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 Daerah Kab/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	14	69.514.000	0	1.071.000	5	53.238.484	-	0					0	1.071.000	0	-	
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi &Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yg diverifikasi	12	106.041.688	1	24.509.600	4	23.828.500	-	0	-	0		0		24.509.600	1	1	
	Meningkatnya Koperasi Aktif		Persentase koperasi Aktif	39,5	2.878.969.670															Bidang Pemberdayaa n Koperasi

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yg diterbitkan	26	902.169.808	30,3	54.628.000	23	314.219.808	-	0	-	70.757.250		70.757.250	30,3	125.385.250	1	229,53	
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	15	902.169.808	4	54.628.000	3	314.219.808	-	0		70.757.250	0	70.757.250	4	125.385.250	1	229,53	
		Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40	902.169.808	10	54.628.000	10	314.219.808	-	0	-	70.757.250		70.757.250	10	125.385.250	1	229,53	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	38,5	1.976.799.862	17,69	399.261.100	36,4	510.370.000				151.845.600		151.845.600	17,69	551.106.700	1	138,03	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang menerima hibah	5	360.000.000	1	100.000.000	5	90.000.000				0		0	1		1	-	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200	360.000.000	50	100.000.000	50	90.000.000							50		1	-	
		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kab/Kota	Persentase UKM yang menjadi peserta pelatihan	38,5	1.616.799.862	17,69	399.261.100	36,4	420.370.000				151.845.600		151.845.600	17,69	551.106.700	1	138,03	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM	610	1.616.799,862	247	399.261.100	160	420.370.000				151.845.600		151.845.600	247	551.106.700	1	138,03	
	Meningkatnya Kualitas kesehatan Koperasi		Persentase koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi	39	2.760.429,681															
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	37	157.668.589	28,97	86.605.000	34	18.684.589	0			1.937.000		1.937.000	28,97	88.542.000	1	102,24	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yg WilayahKeanggotaann ya dlm Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi, KSP/USP koperasi yg diperiksa dan diawasi	32	157.668.589	39,36	86.605.000	29	18.684.589				1.937.000		1.937.000	39,36	88.542.000	1	102,24	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, sertaAkuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	320	157.668.589	86	86.605.000	50	18.684.589				1.937.000		1.937.000	86	88.542.000	1	102,24	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	33	302.761.092	28,97	65.382.200	30	65.704.492				11.416.000		11.416.000	28,97	76.798.200	1	117,46	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan koperasi	100	302.761.092	100	65.382.200	100	65.704.492				11.416.000		11.416.000	100	76.798.200		117,46	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yg Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	400	302.761.092	111	65.382.200	100	65.704.492				11.416.000		11.416.000	111	76.798.200	1	117,46	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	40	2.300.000.000	24,08	362.691.900	34	270.219.386				0		0	24,08	362.691.900	1	100	
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	15	1.500.804.627	12	375.804.627	12	270.219.386				0		0					
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, & Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120	1.424.036.202	30	362.691.900	30	253.450.961				0		0	30	362.691.900	1	100	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yg Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dlm Peningkatan Taraf Hidup KeluargamelaluiKehidupan Berkoperasi & Pengembangan Ekonomi Lainnya	40	76.768.425	10	16.605.000	10	16.768.425				0		0	10	16.605.000	1	100	UPT Dana Bergulir
	Meningkatnya jumlah Pelaku Usaha Mikro		Persentase Pertumbuhan Wira Usaha baru	2	2.300.000.000															Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yg mengalami peningkatan volume usaha	2	2.300.000.000	1,82	690.721.017	1,85	565.051.606				119.390.450		119.390.450	1,82	810.111.467	1	117,28	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
			Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,6	-	2,19		2,3										1		
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	100	3.064.972.974	100	690.721.017	100	565.051.606				119.390.450		119.390.450	100	810.111.467	1	117,28	
			Persentase Kelurahan yang memiliki wirausaha baru minimal 2	100	-	100		100								100		1		
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen hasil pendataan UM	1200 0	371.663.748	1	86.663. 900	1	86.663.748				2.997.000		2.997.000	1	89.660.900	1	103,46	
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	200	897.547.022	50	202.442. .867	50	145.242.022				3.300.000		3.300.000	50	205.742.867	1	101,63	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100	417.056.804	50	96.990.60 0	25	91.028.804				0		0	50	96.990.600	1	100	UPT Dana Bergulir

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usah Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200	1.378.705.400	95	304.623.650	50	242.117.032			70	113.093.450	70	113.093.450	165	417.717.100	1,74	173,68	
			Persentase Usaha Mikro yang naik Kelas	2	2.800.000.000															
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	2	2.800.000.000	1,76	183.563.300	1,7	426.311.299	-			34.448.500		34.448.500	1,76	218.009.800	1	118,77	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Wirausaha yang dilakukan pendampingan	100	2.626.311.299	100	183.563.300	100	426.311.299	-			34.448.500		34.448.500	100	218.009.800	1	118,77	
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	400	2.626.311.299	100	183.563.300	100	426.311.299	-			34.448.500		34.448.500	100	218.009.800	1	118,77	
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,00	19.937.154.614															Sekretariat Dinkop, UKM & Naker
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	19.937.154.614	81,50	3.942.316.627,20	81,50	4.529.465.666				2.095.008.729		2.095.008.729					

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg tepat waktu & sesuai standar	100	215.865.470	100	10.039.600	100	42.155.823				0		0	100	10.039.600	1	100	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	5	25.865.970	5	5.769.700	5	6.365.970				0		0	5	5.769.700	1	100	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja& Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Lap hasil KoordinasiPenyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	189.999.500	4	4.269.900	4	35.789.853				0		0	4	4.269.900	1	100	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	14.897.404.480	100	3.190.685.267	100	3.637.811.834				1.761.658.570		1.761.658.570	100	4.952.343.837			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	14.885.435.502	27	3.190.685.267	27	3.636.149.702				1.761.658.570		1.761.658.570	27	4.952.343.837	1	100	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	11.968.978	0	0	12	1.662.132				0		0	-	0	-	0	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	417.773.784	100	37.508.600	100	90.102.730				23.900.000		23.900.000	100	61.408.600 -		163,72	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	225.000.000	0	0	2	50.632.500			1	18.900.000	1	18.900.000	1	18.900.000	1	100	
		Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yg Mengikuti Sosialisasi Peraturan Per UU-an	200	192.773.784	50	37.508.600	50	39.470.230				5.000.000		5.000.000	50	42.508.600	1	113,33	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	911.619.936	100	430.182.137	100	259.053.512				62.873.824		62.873.824	100	493.055.961	1	114,62	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	1	24.499.648	1	4.792.600	1	4.999.648				0		0	1	4.792.600	1	100	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	2	102.415.515	3	1.493.800	3	27.415.515			1	7.662.200	1	7.662.200	4	9.156.000	1,33	612,9	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	1	46.793.579	1	11.408.800	1	11.543.579				0		0	1	11.408.800	1	100	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	110.747.900	10	31.265.200	10	22.247.900				0		0	10	31.265.200	1	100	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1	110.156.244	1	27.301.200	1	24.656.244				10.144.000		10.144.000	1	37.445.200	1	137,16	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	9.420.000	12	2.700.000	12	1.920.000			6	1.300.000	6	1.300.000	18	4.000.000	1,5	148,15	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	495.587.050	12	120.295.683	12	166.270.626			6	43.767.624	6	43.767.624	18	164.063.307	1,5	136,38	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100	1.240.147.510	100	278.253.663	100	329.579.000				146.038.228		146.038.228	100	433.291.891		155,72	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	179.347.510	12	56.328.809	12	64.379.000			6	26.775.737	6	26.775.737	18	83.104.546	1,5	147,53	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.060.800.000	12	230.924.854	12	265.200.000			6	119.262.491	6	119.262.491	18	350.187.345	1,5	151,65	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	1.597.872.564	0	0	100	43.291.897				34.862.180		34.862.180	100	34.862.180			

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90	246.072.650	0	0	25	8.429.060				0		0		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	151.799.914	0	0	3	8.498.430			1	8.498.430	1	8.498.430	1	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	150.000.000	0	0	1	26.364.407			1	26.363.750	1	26.363.750	1	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	656.470.870	100	217.572.214	100	127.470.870				65.675.927	100	65.675.927	283.248.141	130,19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	303.210.870	10	76.076.342	10	76.710.870			4	23.409.927	4	23.409.927	14	130,77
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	89.410.000	10	19.346.400	10	21.910.000			6	13.416.000	6	13.416.000	16	19,35
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	251.850.000	1	122.149.472	1	28.850.000			1	28.850.000	1	28.850.000	150.999.472	123,62

Sumber : Dinkop, UKM & Naker Blitar, 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun 2023

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan, tidak mengalami perubahan di Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja			
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Jumlah
1.	Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar	45	0	0	45

Sumber : Dinkop, UKM & Naker Kota Blitar, 2023

Dari tabel diatas, sub kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2023 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada

Perubahan Renja Tahun 2023 sebanyak 21 sub kegiatan. Adapun sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.2. dibawah ini :

Tabel 3.2 Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah / Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	6.365.970	6.365.970	-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.662.132	1.662.132	-
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.648	4.999.648	-
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.415.515	27.415.515	-
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.543.579	11.543.579	-
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.656.244	24.656.244	-
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.270.626	166.270.626	-
8.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.364.407	26.364.407	-
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.379.000	64.379.000	-
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.200.000	265.200.000	-
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.710.870	76.710.870	-
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	21.910.000	21.910.000	-
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.280.000	22.280.000	-
14.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha	314.219.808	314.219.808	-

	Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
15.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	18.684.589	18.684.589	-
16.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	90.000.000	90.000.000	-
17.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	420.370.000	420.370.000	-
18.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	253.450.961	253.450.961	-
19.	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	16.768.425	16.768.425	-
20.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	86.663.748	86.663.748	-
21.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	91.028.804	91.028.804	-

Sumber : Dinkop, UKM & Naker Kota Blitar, 2023

Sub kegiatan yang mengalami pengurangan pagu indikatif tetapi tidak mengurangi target kinerja sebanyak 13 sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini:

Tabel. 3.3. Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.789.853	34.473.582	1.316.271
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.636.149.702	3.557.249.702	78.900.000
2. 3.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.632.500	50.250.000	382.500
4.	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	39.470.230	38.918.230	552.000
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.247.900	20.112.900	2.135.000
6.	Pengadaan Mebel	8.429.060	8.075.000	354.060
7.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65.704.492	63.584.492	2.120.000
8.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	145.242.022	145.239.562	2.460
9.	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan kewirausahaan	242.117.032	227.117.028	15.000.004
10.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan	426.311.299	379.666.855	46.644.444

	Teknologi			
11.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	77.910.773	55.284.510	22.626.263
12.	Job Fair/Bursa Kerja	84.661.561	81.986.075	2.675.486
13.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	53.238.484	44.451.005	8.787.479

Sumber : Dinkop, UKM & Naker Kota Blitar, 2023

Sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran sebanyak 5 sub kegiatan. Penambahan kegiatan tersebut dianggarkan untuk :

1. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Penyesuaian standart harga

Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4. Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.920.000	3.900.000	1.980.000
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.498.430	39.610.953	31.112.523
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.850.000	56.900.000	28.050.000
4.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.999.999.913	2.099.999.418	99.999.505

5.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	22.828.500	54.267.700	31.439.200
----	--	------------	------------	------------

Sumber : Dinkop, UKM & Naker Kota Blitar, 2023

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2023

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2023;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan perubahan sumber dana dan kebijakan Pemerintah Kota Blitar lainnya.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2023 terlihat dalam tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RPJMD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KEL OMP OK SAS ARA N	PRAKIRAAN MAJU PERNCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB						
								TARGET 2023		PAGU INDIKATIF						LOKAS I	SUMBE R DANA		PRIORITAS		TA R G ET	PAGU INDIK ATIF		
								SEMULA	MENJAD I	RKPD 2023									APBD 2023	RKPD 2023 PERUBAH AN			NASI ONA L	DAE RAH
1					2	3	3	4	9		10	11					12	13	14	15				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.938.666.077	8.938.666.077	9.118.751.042	Kota Blitar						9.786.654.196	Dinkop, UKM dan Naker				
2	0	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					2.238.639.231	2.238.639.231	2.335.988.412		DBHCH T dan Pendapa tan Bagi Hasil					2.408.771.300	Bidang Ketenagakerj aan				
2	0	7	0	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja		47%	47%	1.999.999.913	1.999.999.913	2.099.999.418		DBHCH T				48 %	1.999.999.700					
2	0	7	0	2.0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih		83%	83%	1.999.999.913	1.999.999.913	2.099.999.418						85 %	1.999.999.700					

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berdasarkan klaster kompetensi		175 orang	175 orang	1.999.999.913	1.999.999.913	2.099.999.418					Pencari Kerja	175 orang	1.999.999.700	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-Persentase pencari kerja yang ditempatkan		79%	79%	162.572.334	162.572.334	137.270.585						81%	232.772.300	
						-Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online		14%	14%					Pendapatan Bagi hasil				16%		
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	Jumlah pencari kerja terdaftar		150 orang	150 orang	77.910.773	77.910.773	55.284.510						230 orang	23.691.300	
2	07	04	2.01	0001	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		150 orang	150 orang	77.910.773	77.910.773	55.284.510						0	0	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yang melamar kerja melalui informasi pasar kerja		32,70%	32,70%	84.661.561	84.661.561	81.986.075						33,30%	209.081.000	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja		30 orang	30 orang	84.661.561	84.661.561	81.986.075					Pencari Kerja	35 orang	125.756.400	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan		100%	100%	76.066.984	76.066.984	98.718.705		Pendapatan Bagi hasil				100%	175.999.300	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama		75 perusahaan	75 perusahaan	76.066.984	76.066.984	98.718.705						85 perusahaan	175.999.300	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		5 perkara	5 perkara	53.238.484	53.238.484	44.451.005						5 perkara	102.554.200	
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		1 asosiasi dan serikat pekerja	1 asosiasi dan serikat pekerja	22.828.500	22.828.500	54.267.700						4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	72.349.900	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6.700.026.846	6.700.026.846	6.782.762.630		Pendapatan bagi Hasil					7.377.882.896	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2	1701				PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,00	81:50:00	81,5	4.529.465.666	4.529.465.666						82 indeks	4.842.661.985	
2	1701	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	100%	100%	42.155.823	42.155.823	40.839.552					100%	39.739.600	
2	1701	2.01		0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5 dokumen	5 dokumen	6.365.970	6.365.970	6.365.970					5 dokumen	6.356.000	
2	1701	2.01		0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4 laporan	4 laporan	35.789.853	35.789.853	34.473.582					4 laporan	33.383.600	
2	1701	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	100%	100%	3.637.811.834	3.637.811.834	3.558.908.834					100%	3.751.891.785	
2	1701	2.02		0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	27 orang/bln	27 orang/bln	3.636.149.702	3.636.149.702	3.557.249.702					27 orang/bulan	3.746.871.585	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12 laporan	12 laporan	1.662.132	1.662.132	1.662.132						12 laporan	5.020.200	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	100%	100%	90.102.730	90.102.730	89.168.230		Pendapatan Bagi hasil				100%	94.743.000	
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	2 paket	2 paket	50.632.500	50.632.500	50.250.000						2 paket	49.200.000	
2	17	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	#REF!	50 orang	50 orang	39.470.230	39.470.230	38.918.230						55 orang	45.543.000	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	100%	100%	259.053.512	259.053.512	261.033.512		Pendapatan Bagi hasil				100%	317.403.600	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1 paket	1 paket	4.999.648	4.999.648	4.999.648						1 paket	5.084.500	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2	1701	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	3 paket	3 paket	27.415.515	27.415.515	27.415.515						2 paket	29.108.000	
2	1701	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1 paket	1 paket	11.543.579	11.543.579	11.543.579						1 paket	11.654.600	
2	1701	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	10 paket	10 paket	22.247.900	22.247.900	20.112.900						10 paket	22.585.000	
2	1701	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1 paket	1 paket	24.656.244	24.656.244	24.656.244						1 paket	24.998.500	
2	1701	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12 dokumen	12 dokumen	1.920.000	1.920.000	3.900.000						12 dokumen	5.400.000	
2	1701	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12 laporan	12 laporan	166.270.626	166.270.626	166.270.626						12 laporan	217.423.000	
2	1701	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100%	100%	43.291.897	43.291.897	74.050.360		Pendapatan Bagi hasil				100 persen	110.421.900	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		25 unit	25 unit	8.429.060	8.429.060	8.075.000						25 unit	23.112.5000	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 unit	3 unit	8.498.430	8.498.430	39.610.953						5 unit	87.309.400	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	1 unit	26.364.407	26.364.407	26.364.407						0	0	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar		100%	100%	329.579.000	329.579.000	329.579.000			Pendapatan Bagi hasil			100%	340.483.200	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	64.379.000	64.379.000	64.379.000						12 laporan	67.948.800	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	265.200.000	265.200.000	265.200.000						12 laporan	272.534.400	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100%	100%	127.470.870	127.470.870	155.520.870			Pendapatan Bagi hasil			100%	187.978.900	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2	1	0	2.0	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 unit	10 unit	76.710.870	76.710.870	76.710.870						11 unit	101.531.400	
2	1	0	2.0	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 unit	10 unit	21.910.000	21.910.000	21.910.000						3 unit	19.247.500	
2	1	0	2.0	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	1 unit	28.850.000	28.850.000	56.900.000						1 unit	61.800.0000	
2	1	0			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan		23%	23%	314.219.808	314.219.808	314.219.808		Pendapatan bagi Hasil				24 %	293.945.300	
2	1	0	2.0		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan		3 unit usaha	3 unit usaha	314.219.808	314.219.808	314.219.808						3 unit usaha	293.945.300	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2	1702	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 unit usaha	10 unit usaha	314.219.808	314.219.808	314.219.808							10 Unit Usaha	293.945.300	
2	1703			ROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	34%	34%	18.684.589	18.684.589	18.684.589			Pendapatan bagi Hasil				35%	18.685.000	
2	1703	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	29%	29%	18.684.589	18.684.589	18.684.589							30%	18.685.000	
2	1703	2.01	0003	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 unit usaha	50 unit usaha	18.684.589	18.684.589	18.684.589							0	0	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2	1704				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)		30%	30%	65.704.492	65.704.492	63.584.492		Pendapatan bagi Hasil				31%	65.705.300	
2	1704	2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP		100%	100%	65.704.492	65.704.492	63.584.492						100%	65.705.300	
2	1704	2.01	0003		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi		100 unit usaha	100 unit usaha	65.704.492	65.704.492	63.584.492						100 Unit Usaha	65.705.300	
2	1705				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi		36,40%	36,40%	510.370.000	510.370.000	510.370.000		Pendapatan bagi Hasil				37,10%	495.370.000	
2	1705	2.01			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan		5%	5%	90.000.000	90.000.000	90.000.000						5%	495.370.000	
2	1705	2.01	0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		50 orang	50 orang	90.000.000	90.000.000	90.000.000						15 orang	495.370.000	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

					Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKM yang menjadi peserta pelatihan		36,40%	36,40%	420.370.000	420.370.000	420.370.000						0	0	
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM		160 orang	160 orang	420.370.000	420.370.000	420.370.000						0	0	
2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha		34%	34%	270.219.386	270.219.386	270.219.386		Pendapatan bagi Hasil				36 %	391.784.311	
2	1	0	2.0		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi		12%	12%	270.219.386	270.219.386	270.219.386						13 %	391.784.311	
2	1	0	2.0	0007	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		30 orang	30 orang	253.450.961	253.450.961	253.450.961						0	0	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2	17	06	2.01	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		10 keluarga	10 keluarga	16.768.425	16.768.425	16.768.425							0	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume Usaha		1,85%	1,85%	565.051.606	565.051.606	550.049.142		Pendapatan bagi Hasil				2,40%	843.411.000	
						Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital		2,30%	2,30%								1,90%			
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan		100%	100%	565.051.606	565.051.606	550.049.142		Pendapatan bagi Hasil				100%	843.411.000	
						Persentase Kelurahan yang memiliki wirausaha baru minimal 2		100%	100%								100%			

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

					Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kab/kota		12000 unit usaha	12000 unit usaha	86.663.748	86.663.748	86.663.748								
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		50 unit usaha	50 unit usaha	145.242.022	145.242.022	145.239.562						50 Unit Usaha	295.244.800	
					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		25 orang	25 orang	91.028.804	91.028.804	91.028.804						0	0	
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usah Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		50 orang	50 orang	242.117.032	242.117.032	227.117.028						50 Orang	242.120.000	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Wira Usaha Baru yang berhasil dikembangkan		1,70%	1,70%	426.311.299	426.311.299	379.666.855			Pendapatan bagi Hasil			1,80%	426.320.000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Wirausaha yang dilakukan Pendampingan		100%	100%	426.311.299	426.311.299	379.666.855						100%	426.320.000	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2	17	08	2.01	0006	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		100 unit usaha	100 unit usaha	426.311.299	426.311.299	379.666.855							100 Unit Usaha	426.320.000	
---	----	----	------	------	---	---	--	----------------	----------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	----------------	-------------	--

Sumber : Dinkop, UKM & Naker Kota Blitar, 2023

Selain melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan diatas, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja juga memfokuskan pada :

- a. Perlu adanya Diklat dan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan administrasi koperasi;
- b. Perlu adanya peningkatan pemberdayaan Koperasi untuk peningkatan kualitas usaha koperasi untuk mendukung kontribusi terhadap pendapatan Kota Blitar
- c. Perlu adanya rutinitas untuk pendampingan guna peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi yang diwujudkan dengan peningkatan persentase koperasi aktif yang sehat;
- d. Perlu adanya pendampingan terhadap usaha mikro oleh suatu lembaga dalam penguatan produk.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2023.
2. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - o melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

- menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Blitar, Juli 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KOTA BLITAR



JUYANTO SE.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196609211989031009